

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak antara benua-benua dan jalur perdagangan Internasional yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang asing. Pulau-pulau besar dengan mulut sungai yang lebar, garis pantai dan teluk-teluknya seakan mengkondisikan sebuah masyarakat dengan karakteristik sebagai pelaut, nelayan dan pedagang yang handal. Gambaran umum mengenai manusia Indonesia selama ini adalah masyarakat primitif yang tinggal di tempat-tempat terpencil atau masyarakat desa yang terisolasi.<sup>1</sup> Namun sebuah penelitian mutakhir oleh sejarawan Australia Anthony Reid abad ke-19 tentang tradisi maritim Indonesia berhasil mengaburkan stereotip terhadap keterbelakangan masyarakat Indonesia seperti yang sudah mengakar dalam pengetahuan kita.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan daerah pesisir pantai Utara Jawa sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis yang menguntungkan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan proses perkembangan maritim khususnya di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Ong Hok Ham, *Dari Soal Priayi Sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm., 68.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm., 70. Pada abad ke-16 atau 17 kepulauan Indonesia telah menjadi daerah yang paling urban, artinya memiliki penduduk kota yang paling padat di dunia. Berbicara mengenai manusia Indonesia pada abad-abad itu yang dimaksud oleh Anthony Reid adalah orang kota, yaitu para nelayan, pedagang, pelaut, tukang dan lain-lain yang tidak mengenal pertanian. Di halaman yang sama juga disebutkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah keraton saja tradisi agraris dapat ditemukan. Penggambaran kota pesisir dalam kajian ini hanya sebatas pada wujud kota pesisir yang paling banyak mendapatkan perhatian jika dibandingkan dengan kota-kota pedalaman. Selain itu perkembangan kota pedalaman masih berkaitan erat dengan kota-kota pesisir yang menyerap hasil-hasil bumi dari pedalaman.

Timbulnya kota-kota pantai tersebut abad ke-1 sampai abad ke-14 seperti Tuban, Gresik, Surabaya, Demak, Jepara, Lasem, Semarang, Cirebon, Banten dan Sunda Kelapa merupakan akibat dari perdagangan India dan Cina.<sup>3</sup> Jadi terbentuknya kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa sebenarnya sudah ada jauh sebelum datangnya Belanda ke nusantara pada abad ke-16. Pertumbuhan kota pada awalnya merupakan sebuah kawasan pemukiman yang berada dalam penguasaan bumiputra,<sup>4</sup> kota berkembang sejalan dengan pesatnya perdagangan.<sup>5</sup>

Kedatangan Belanda yang kemudian mengambil alih hampir seluruh aspek kehidupan di Jawa (nusantara) tak terkecuali pemerintahan, berangsur-angsur menggeser keberadaan penguasa-penguasa pribumi. Keberadaan kota-kota pantai sebagai sentra perdagangan walaupun tetap eksis namun kedudukannya hanya sebatas untuk kepentingan kolonial. Kekuasaan Belanda terus melebar hingga ke

---

<sup>3</sup>Handinoto, "Perkembangan Kota dan Arsitektur di Pasuruan dan Probolinggo Pada Jaman Kolonial (1800-1940): Sebuah Perbandingan" (Surabaya: Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Kristen PETRA, 2000), (Laporan penelitian tidak diterbitkan), hlm. 8. Lihat Amen Budiman, *Semarang Riwatmu Dulu* jilid I (Semarang: Tanjung Sari, 1978), hlm., 33. Penemuan prasasti Canggal yang berangka tahun 654-732 Saka tertulis bahwa pada jaman dinasti Syailendra dari kerajaan Mataram kuno terdapat sebuah pelabuhan yang sarat dengan kegiatan dagang oleh orang-orang Jawa dan mancanegara. Pelabuhan ini merupakan bandar utama kerajaan Mataram kuno sebelum akhirnya surut akibat pendangkalan sungai Bergota. Kehendak alam yang tak mungkin terelakkan, mengakhiri kejayaan perniagaan di Mataram.

<sup>4</sup>Abdurrahman Surjomihardjo, "Rekonstruksi Sejarah Kota Melalui Perkembangan Tiga Jalur Pranata Sosial" dalam T. Ibrahim Alfian, (ed.,all.) *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm., 264. Penguasa bumiputra yang dimaksud di sini adalah semacam bupati yang mendapat mandat dari raja setempat untuk mengurus sebagian dari wilayah kekuasaan raja.

<sup>5</sup>Para pedagang asing yang singgah dan menetap sementara di kota pelabuhan ini biasanya mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal yang tak jauh dari pemukiman penduduk pribumi. Komunitas mereka terus berkembang dan membentuk suatu pemukiman berdasarkan kesukuan atau bangsa, misalnya pemukiman Arab, Persia, Gujarat dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari negara Islam ini berkembang pesat dan banyak diantara mereka kemudian mendirikan masjid disekitar pemukiman juga mendatangkan ulama-ulama dari luar negeri. Lihat Amen Budiman, *op. cit.*, hlm. 52.

pelosok, mencari dan menggali tiap potensi alam Indonesia yang masih bisa menguntungkan untuk segera dieksploitasi. Kemudian kota-kota di pedalaman atau kota-kota agraris yang jauh dari garis pantai, perlahan-lahan mulai muncul dan berperan. Berkembangnya daerah pedalaman tak luput dari diwujudkannya pembangunan jalan raya pos (*grooet postweg*) pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811) yang menghubungkan antar kota-kota pelabuhan.<sup>6</sup> Pembangunan prasarana jalan darat ini kemudian memberikan peluang bagi para investor asing untuk lebih intensif membangun daerah-daerah pedalaman agar lebih berkembang dengan pemberdayaan perkebunan-perkebunan didaerah *hinterland*.

Pembukaan daerah ujung timur dari propinsi Jawa Timur sebagai daerah perkebunan berawal dari penjualan tanah negara kepada pihak swasta oleh Daendels pada awal abad XIX.<sup>7</sup> Daerah-daerah itu kemudian menjadi sentra bagi produksi hasil-hasil alam, seperti Pasuruan, yang dikenal sebagai kota gula,<sup>8</sup> Probolinggo, Panarukan, dan Besuki. Tahun 1855 Pasuruan menjadi ibukota Karesidenan Pasuruan yang membawahi Malang, Bangil, dan kabupaten Pasuruan itu sendiri.<sup>9</sup> Daerah-daerah disekitar perkebunan-perkebunan besar misalnya

---

<sup>6</sup>Handinoto, *op. cit.*, hlm. 10. Jalan raya ini merupakan sarana pengiriman hasil pertanian lewat darat yang dipergunakan pihak-pihak kolonial untuk sampai ke pelabuhan.

<sup>7</sup>Bijdragen Tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch – Indië, Deel. 64, KITLV, ('s-Gravenhage: Marter Nijhoff, 1918), hlm. 328-330, 374-392 dalam Putri Agus Wijayati, *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris* (Yogyakarta: Tawang Press, 2001), hlm. 2.

<sup>8</sup>Djoko Soekiman., *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa* (Yogyakarta: Bentang, 2000), hlm. 210. Perusahaan dagang Belanda *NHM (Nederlandsch Handelmaatschappij)* yang berdiri tahun 1824, pernah mengekspor sebanyak 10.963,5 pikul kopi dan 10.843 pikul gula langsung dari pelabuhan Pasuruan. Lihat Handinoto, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 20.

Malang mendapatkan imbas yang positif dari berkembangnya tanah perkebunan tersebut.

Wilayah Malang yang berada di pedalaman perlahan-lahan mulai mendapatkan posisi. Awal keberadaannya yang semula hanya sebagai basis pengumpulan hasil-hasil perkebunan dari wilayah disekitarnya sebelum diangkut ke Surabaya menjadi pesat. Pembangunan sarana transportasi darat seperti pembukaan jalur kereta api Bangil-Malang, adalah satu dari sekian pembenahan yang dilakukan pihak kolonial sebagai pemberdayaan wilayah jajahannya di pedalaman.<sup>10</sup> Iklim yang sejuk menjadi pilihan yang cocok untuk wilayah pemukiman.<sup>11</sup>

## B. Permasalahan

Suatu analisa kehidupan kota di daerah jajahan pada umumnya merupakan pendekatan yang amat berguna bagi studi sejarah kota dan lebih dari itu tentang transformasi yang terjadi kemudian terhadap proses-proses kekuasaan kolonial. Apabila kita dapat memahami kota-kotanya kita akan dapat memahami lebih banyak tentang dinamika sejarah mana pun, dalam arti sebagai hal yang melengkapi pemahaman yang didapat dari sebuah studi daerah pedesaan.<sup>12</sup>

Mengamati perkembangan suatu kota tidak lepas dari aspek sosio-historis kota itu dimana permasalahan urbanisasi berkecenderungan melekat erat

---

<sup>10</sup>Suwardono, *Monografi Sejarah Kota Malang* (Malang:Sigma Media, 1997), hlm. 19.

<sup>11</sup>Adanya perusahaan perkebunan dengan pabrik-pabrik milik swasta Eropa di berbagai wilayah kabupaten, lambat-laun semakin banyak rumah gedung atau villa yang terletak di daerah-daerah perkebunan atau di lereng-lereng perbukitan., dalam Djoko Soekiman, *op. cit.*, hlm. 206. Tahun 1850 daerah Malang sebelah barat sungai Brantas sudah mulai terlihat perkampungan warga Belanda. Lihat Suwardono, *op. cit.*, hlm., 18.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm., 256.

didalamnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena konsep urbanisasi itu sendiri yang secara definitif memang berkenaan dengan proses pengkotaan suatu daerah.<sup>13</sup> Proses mengkotanya suatu daerah, ditunjang dengan dibangunnya berbagai macam fasilitas hidup tentu akan mempengaruhi pola pemukiman dan penataan suatu kota. Kota Malang misalnya, sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor geografi, yakni letak atau posisinya yang menunjang perkembangan ekologi manusia dengan berbagai aktifitas hidup. Masyarakat sangat mungkin berperan dalam perkembangan fungsi kota, sesuai dengan pendapat Yona Friedman:<sup>14</sup>

“Banyak kota-kota besar direncanakan secara ‘militeristik’ dengan pendekatan dari atas, sedangkan sebetulnya suatu kota yang baik harus ditumbuhkan dari bawah dengan wawasan yang bertujuan pada kepentingan masyarakat.”

Itulah sebabnya aktifitas masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan sebuah kota.

Pengertian sejarah kota Malang dalam tulisan ini akan melihat secara khusus sebagai riwayat suatu pemukiman, perkembangan fisik kota dan kehidupan penduduknya serta aktifitas ekonomi dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang sangat menentukan perkembangan sejarah suatu kota. Dalam hal ini, yang akan menjadi fokus penulisan adalah selama kurun waktu pemerintahan kolonial di Jawa sebelum masa pergolakan yang terjadi menjelang

---

<sup>13</sup> Rahardjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm., 55.

<sup>14</sup> Yona Friedman dalam Eko Budihardjo, *Arsitektur dan Kota di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), hlm., 82.

berakhirnya kekuasaan kolonial. Perkembangan kota dan perubahan-perubahan sistem sosial-ekonomi sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi fenomena, sebuah realita yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat. Selama kurun waktu tersebut sistem administrasi pemerintahan pernah mengalami masa pancaroba, yaitu beralihnya sistem sentralistik menjadi desentralisasi pada tahun 1905.<sup>15</sup> Melalui undang-undang ini diharapkan administrasi lebih efisien dan memberikan kesempatan kepada penduduk lokal dalam pemerintahan lokal. Sebenarnya tujuan awal dan utama dari desentralisasi adalah memajukan perdagangan di daerah yang lepas dari pemerintahan pusat dalam hal-hal yang bersifat detail.<sup>16</sup> Selain itu pemerintah sangat mengandalkan pertanian sebagai salah satu pendapatan yang bisa mendukung kedudukannya di Hindia Belanda. Sumber-sumber keuangan untuk memajukan produksi pertanian atau perkebunan terus menerus diusahakan untuk mendapat dana bantuan berupa kredit.<sup>17</sup>

Uraian tersebut merupakan jembatan dari beberapa pokok masalah yang nantinya akan dikupas lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya. Permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini adalah: *pertama*, bagaimana perkembangan Malang

---

<sup>15</sup>Undang-undang Desentralisasi dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903 dan keputusan desentralisasi itu sendiri baru turun sekitar tahun 1905, lihat Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm., 37.

<sup>16</sup>J.S. Furnivall, *Nederlands India. A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1944), hlm., 264.

<sup>17</sup>Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 47. Saat krisis ekonomi melanda, sektor pertanian yang sebelumnya paling diunggulkan mengalami kemerosotan produksi akibat musim kemarau yang datang lebih cepat dan panjang. Hal ini mengakibatkan harga-harga hasil pertanian secara keseluruhan rendah. Pinjaman untuk sektor pertanian yang lebih besar dibanding sektor lain dirasakan sangat kurang menguntungkan.

menjadi sebuah kota yang sarat fasilitas bagi mobilisasi penduduk. *Kedua*, bagaimana proses transformasi masyarakat kota Malang dibidang sosial-ekonomi?

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulisan sejarah sebagai suatu rekonstruksi masa lalu harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat unik. Keunikan dari sejarah adalah bahwa suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat pada kurun waktu tertentu tidak akan terulang di tempat dan waktu lain.

Kajian ini mengambil kota Malang sebagai batasan wilayah, dengan fokus perkembangan kota beserta fasilitasnya dan perkembangan sosial-ekonomi yang menyertai perubahan kota secara administratif yaitu setelah Malang menjadi sebuah kotapraja. Pergeseran-pergeseran yang ditimbulkan selalu membawa dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakatnya. Kebijakan politik yang terjadi di kota itu merupakan awal bagi segala perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang akan menjadi pokok bahasan. Perubahan masyarakat akibat semakin terbukanya kesempatan bermobilisasi adalah awal terciptanya sebuah struktur kota. Kesempatan berpendidikan menciptakan sumber daya manusia yang setara dengan kebutuhan industri, kebutuhan pegawai badan-badan pemerintah dan sebagainya. Jadi, perkembangan kota Malang tahun 1914-1940 merupakan sebuah kajian dari berkembangnya kota dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial menjadi sangat beragam manakala terjadi pertumbuhan penduduk yang menjadikan kota semakin kompleks.

Sedangkan batasan waktu yang diambil antara tahun 1914-1940. Batasan ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pada tahun 1914, Malang ditetapkan

sebagai kotapraja. Pada tahun itu kota Malang berkembang pesat seiring dengan perkembangan infrastruktur dan komunikasi besar-besaran yang dilakukan pihak swasta dan pemerintahan kolonial Belanda diseluruh Hindia Belanda.<sup>18</sup> Kemudian tahun 1940 menjadi batas akhir tahun penelitian atau penulisan karena pada tahun itu merupakan tahun-tahun akhir bagi pendudukan Belanda di Indonesia sebelum timbulnya gejolak rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan.

#### D. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan pokok kajian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kota Malang kurun waktu 1914-1940 yaitu masa setelah kota Malang berstatus sebagai kotapraja (*gemeente*) secara administratif pada tahun 1914. Perkembangan fisik kota dan pergeseran sosial - ekonomi masyarakat menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini dengan satu keyakinan bahwa dua pokok pranata tersebut adalah titik-titik penting yang sangat menarik untuk dibahas. Kajian tentang sejarah kota, menurut Kuntowijoyo merupakan kajian yang sangat kompleks, karena didalamnya terdapat sebuah sistem sosial.<sup>19</sup> Dan kota hanyalah merupakan lokasi bagi kajian yang bisa bermacam-macam bentuknya, misal dari segi politik, ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. Dari bermacam-macam bidang kajian tersebut maka penulisan Perkembangan kota Malang 1914-1940 memfokuskan pada kajian dibidang perkembangan kota dan perubahan sosial-ekonomi masyarakatnya.

---

<sup>18</sup>Handinoto, *Perkembangan Kota... op. cit.*, hlm. 9.

<sup>19</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* ( Yogyakarta:Tiara wacana, 1994), hlm. 51-62.



Kota yang semakin pesat ditunjang oleh pembangunan sarana prasarana bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat membawa dampak positif. Kesejahteraan meningkat, pusat-pusat perawatan kesehatan, pendidikan, industri dan sektor-sektor ekonomi yang mulai akrab dengan masyarakat membawa kearah yang lebih baik.

#### **E. Metode Penelitian**

Pada awal penulisan sejarah, kita akan selalu dihadapkan pada pengertian dari sejarah itu sendiri. Secara umum sejarah merupakan segala sesuatu, rangkaian peristiwa yang telah terjadi kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan tentang masa lampau.<sup>20</sup> penyusunannya ke dalam sebuah cerita sejarah dikerjakan berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan. Seorang sejarawan dituntut untuk dapat menjelaskan masa kini sebagai suatu proses sejarah, hasil proses interaksi dan dialog dengan fakta-fakta masa lalu. Fakta-fakta tersebut disusun sesuai dengan pola yang mendasari sehingga tercipta sebuah kerangka yang jelas.<sup>21</sup> Penulisan sejarah dibutuhkan suatu metode sejarah. Metode sendiri berarti cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm., 14-15.

<sup>21</sup>Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah* (Jakarta: Mabes ABRI, Pusjarah dan Tradisi ABRI, 1991), hlm., 20.

<sup>22</sup>Fuad Hasan dan Koentjoroningrat, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah" dalam Koentjoroningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm., 10.

Penulisan ini diharapkan menjadi sebuah kajian sejarah yang bersifat deskriptif – naratif namun proses analisis tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk lebih mendekati fakta. Metode yang digunakan dalam penelitian selanjutnya adalah metode sejarah yang sesuai dengan kaidah ilmu sejarah. Pertama adalah pengumpulan data-data (*heuristik*). Ketika semua data yang dibutuhkan mengenai kota Malang, baik dari terbitan resmi misalnya *Stadsgemeente Malang 1914-1939*, dokumen berupa arsip-arsip senada seperti surat keputusan (*Besluit*), laporan-laporan tahunan pemerintah kolonial (*Verslag*), *Provinciaalblad* dan berbagai lembaran negara (*Staatsblad van Nederlandsch Indië*). Dari semua sumber-sumber primer tersebut berbagai referensi sekunder seperti literatur dari buku, hasil penelitian maupun jurnal-jurnal terbitan pemerintah daerah sangat memudahkan penulis untuk merangkaikan fakta sejarah seperti yang tercetak dalam sumber atau data. Sumber sekunder tersebut merupakan literatur-literatur koleksi beberapa Perpustakaan, antara lain: Perpustakaan Bapeda-Surabaya, Perpustakaan pusat Universitas Airlangga, Perpustakaan Universitas Kristen Petra, Perpustakaan Daerah Surabaya-Menur, Perpustakaan ‘St. Ignatius’ Kolose-Yogyakarta dan buku-buku koleksi beberapa teman. Tahap selanjutnya adalah dilakukannya verifikasi atau kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Menurut Mabillon pemakaian dokumen sebagai sumber sejarah memerlukan kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern meneliti apakah dokumen itu autentik, yaitu kenyataan identitasnya; jadi bukan tiruan, turunan, atau palsu.<sup>23</sup> Sumber yang ada memerlukan sumber lain sebagai pembanding.

---

<sup>23</sup> Sartono Kartodirdjo. *Op. cit.*, hlm. 16.

Dengan kata lain harus pula mengadakan prosedur kolaborasi (*corroboration*).<sup>24</sup> Dokumen-dokumen seperti yang tersebut diatas, didapat dari badan-badan arsip seperti: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI-Jakarta), Arsip Pemerintah Daerah Surabaya-Jagir dan beberapa lembaran negara (*Staatsblad van Nederlandsch Indië*) yang bisa didapat dari Perpustakaan Bapeda-Surabaya serta Perpustakaan pusat Universitas Airlangga yang ditulis dalam bahasa asing merupakan sumber yang mendapat giliran pertama untuk memasuki tahapan ini. Penggunaan tata bahasa bisa dijadikan tolak ukur dari suatu zaman yang diceritakan dalam dokumen tersebut. Tahap berikutnya adalah melakukan analisa yang nantinya dapat menghasilkan suatu kesimpulan, penghubung antara sumber dengan kejadian yang sebenarnya dan proses penulisan dalam bentuk historiografi. Pada bagian ini, sebuah rekonstruksi masa lampau sebagai satu kisah sejarah tertuang dalam sebuah karya tulis.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Hasil penelitian yang pernah dilakukan dalam mengungkap sejarah kota Malang antara lain:

*Perkembangan Kota dan Arsitektur kolonial Belanda di Malang* oleh Handinoto<sup>25</sup> yang banyak memaparkan konsep dan perencanaan kota Malang pada masa lalu yang memang belum banyak diketahui orang. Perkembangan fisik kota yaitu perkembangan arsitektur bangunan kota yang direncanakan oleh seorang

---

<sup>24</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 26.

<sup>25</sup> Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* (Yogyakarta: Andi, 1996)

arsitektur berkebangsaan Belanda, Ir. Herman Thomas Karsten merupakan wilayah bahasan yang mendapat proporsi yang lebih besar. Buku ini memang menarik karena telah membukakan jalan bagi kajian sejarah kota, namun tentu saja penulisan sejarah perkembangan kota Malang ini dikerjakan dari kaca mata seorang arsitektur yang banyak menilai masalah bangunan dari segi tata letak dan detail-detail keragaman arsitektur. Hal ini sangat menarik penggabungan antara seni arsitektur kolonial dalam penulisan sejarah suatu kota dimana sebuah perencanaan letak instrumen-instrumen kota telah tergambar secara baik sesuai fungsi dan peranan masing-masing.

*40 Tahun Kota Malang*.<sup>26</sup> Sebuah kilasan mengenai kota Malang sebagai kota kolonial yang sarat dengan berbagai macam fasilitas hidup. Dalam buku setebal 157 halaman ini cukup menggambarkan kehidupan kota selama empat puluh tahun.

Sebuah buku petunjuk yang khusus dicetak oleh pemerintah daerah kotamadya Malang tahun 1969, *Kotamadya Malang Lima Puluh Lima Tahun*.<sup>27</sup> Buku ini seakan menginventaris kekayaan yang dimiliki oleh kota Malang, semua perangkat pariwisata mulai dari penginapan, hotel, rumah makan, hingga biro-biro perjalanan yang menjadi aset kota tertulis dengan rapi didalamnya. Jadwal perjalanan kereta api, bis, hingga pos pengisian bahan bakar, dan semua unit kantor layanan masyarakat. Oleh karena itu buku yang kemungkinan dikeluarkan

---

<sup>26</sup> Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *40 Tahun Kota Malang* (Dewan Pemerintah Daerah, 1954)

<sup>27</sup> Dewan Pemerintah Daerah Kota Malang, *Kotamadya Malang Lima Puluh Lima Tahun* (Malang: Asuransi Bintang, 1969).

oleh departemen penerangan pada masa itu diterbitkan dalam rangka memudahkan masyarakat baik turis maupun lokal untuk mengenali daerahnya, pemipinnya dan aset-aset kota yang wajib dijaga dan dibanggakan.

*Monografi kota Malang* adalah sebuah buku yang sarat dengan pengetahuan sejarah perkembangan kota, artefak-artefak peninggalan beserta visualnya.<sup>28</sup> Buku ini merupakan sebuah bahan bacaan bagi masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran sejarah di lingkungannya. Data-data mengenai peninggalan sejarah, lokasi dan keterkaitannya dengan nama-nama wilayah di Malang cukup baik tersusun.

“Studi tentang kota Malang, sebuah kota yang tertata dengan baik pada masa kolonial (1914-1940)” satu makalah penelitian yang dilakukan oleh Handinoto pada tahun 1998 (tidak diterbitkan).<sup>29</sup> Makalah ini memuat data-data mengenai kondisi masyarakat dan wilayah Malang dalam kurun waktu tersebut. Namun sekilas dapat diketahui bahwa makalah ini merupakan pengembangan dari proyek awal, buku mengenai *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang* yang di cetak tahun 1996.

Satu lagi literatur yang berasal dari hasil penelitian (tidak diterbitkan) dari Handinoto tentang “Perkembangan kota dan Arsitektur di Pasuruan dan Probolinggo Pada Jaman Kolonial 1800-1940”.<sup>30</sup> Makalah ini sarat dengan kajian-

---

<sup>28</sup>Suwardono dan Supriyati Rosmiayah, *Monografi Sejarah Kota Malang* (Malang: Sigma Media, 1996).

<sup>29</sup> Handinoto, “Studi tentang Kota Malang, Sebuah Kota yang Tertata dengan Baik Pada Masa Kolonial (1914-1940)” sebuah karya ilmiah (tidak diterbitkan), (Surabaya: Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Kristen PETRA, 1998).

<sup>30</sup> Handinoto, “Perkembangan Kota dan Arsitektur di Pasuruan...., *op. cit.*”

kajian sejarah kota Pasuruan dan Probolinggo mulai dari awal perkembangan sampai kemudian surutnya kegiatan dagang yang dulu pernah mengalami masa keemasan di kedua kota tersebut. Penulisan karya sejarah oleh seorang arsitektur mungkin sangat membantu lemahnya seorang sejarawan dalam menganalisa struktur bangunan. Bangunan bersejarah yang berkaitan erat dengan suatu wilayah perlu dikaji untuk menilai berkembangnya masyarakat di wilayah tersebut, karena bangunan adalah media ketika masyarakat mulai memobilisasi diri dalam lembaga kemasyarakatan.

Dari sekian banyak karya tulis mengenai kota Malang seperti tersebut diatas merupakan tanda bahwa dari satu wilayah yang sama, kurun waktu yang sama bisa menjadi kajian yang berbeda. Demikian pula dengan “Perkembangan Kota Malang 1914-1940: Tinjauan Sosial-Ekonomi” yang menjadi judul dari penulisan ini, ada perbedaan sudut pandang dan intepretasi terhadap alur bahasanya. Penekanan dalam karya tulis ini terletak pada berkembangnya kota Malang beserta unsur pendukungnya yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya.

#### **G. Kerangka Konseptual**

Penelitian tentang sejarah kota sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial masyarakat disamping banyak faktor pendukung lain, bahkan menurut Kuntowijoyo kajian sosial dalam sejarah kota cenderung lebih beragam dan luas dibandingkan sejarah sosial itu sendiri.<sup>31</sup> Penulisan perkembangan kota Malang

---

<sup>31</sup>Kuntowijoyo, *loc. cit.*

yang ditinjau dari segi sosial-ekonomi mengetengahkan faktor berkembangnya kota sebagai wadah bagi sebuah komunitas yang dinamis. Perkembangan disini adalah sebuah gerak yang kontinyu menuju kearah yang lebih baik. Oleh karena itu kajian ini juga menggunakan ilmu sosiologi sebagai ilmu bantu. Ilmu yang menganalisa segi-segi kehidupan manusia bernasyarakat dalam kawasan kota atau perkotaan adalah kajian sosiologi perkotaan atau sosiologi kota.<sup>32</sup> Jadi kajian mengenai kota, hal yang paling utama dalam pembahasannya adalah sorotan terhadap masyarakat yang menghuni dengan segala kegiatan sesuai dengan perkembangan kota itu sendiri.

Suatu definisi mengenai kota dari Wirth yaitu suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena jumlah penduduknya dan kepadatannya, keadaan daerahnya yang merupakan tempat tinggal permanen dan sifat yang heterogen di kota, maka hubungan sosial menjadi longgar, acuh dan tidak pribadi (*impersonal relation*).<sup>33</sup> Sedangkan pengertian kota bila ditinjau dari segi geografis menurut Prof. Drs R. Bintarto adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang meterialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan

---

<sup>32</sup>Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm., xv.

<sup>33</sup>P.J.M Nas, *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979), hlm., 29.

gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.<sup>34</sup>

Kota sebagai lingkungan kehidupan perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua proses yaitu, proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya (proses alamiah) dan proses perubahan yang dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota (*city planning*). Proses perubahan yang terjadi dengan sendirinya dapat menimbulkan berbagai masalah yang tidak menunjang bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, perubahan perlu dibentuk secara sadar, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota yang bersifat menyeluruh dan perencanaan yang bersifat sektoral.<sup>35</sup> Pemerintah kotapraja (*stadsgemeente*) hakekatnya bertujuan memenuhi kepentingan Belanda belaka, oleh sebab itu sifatnya pelayanan dan lebih ditekankan pada administrasi pemerintah bukan pada pelaksanaan fungsi kota dalam arti sosial ekonomis dan sosial budaya.<sup>36</sup> Kata pemukiman seperti yang telah disebut pada pengertian kota diatas berarti pembukaan bidang-bidang tanah yang belum didiami dan digarap oleh sekelompok orang tertentu. Batasan yang luas ini dapat mencakup, misalnya, aktivitas pertanian, aktivitas perdagangan dan Industri yang notabene berada disektor ekonomi. Semua sektor baik perorangan maupun kelompok yang terdapat dibanyak wilayah (negara) dimana sekelompok orang, atas dasar motif yang berbeda-beda pindah untuk membangun komunitas

---

<sup>34</sup>Ilhami, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm., 4.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm., 5-6

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm., 8.



atau tempat pemukiman baru di daerah yang belum pernah diolah orang.<sup>37</sup> Ada dua motivasi didirikannya sebuah pemukiman, *pertama*, pemukiman timbul akibat proses perpindahan yang menyebabkan lahirnya tipe-tipe proyek pemukiman tertentu dan yang *kedua* adalah timbul dari tujuan-tujuan kebijakan yang sangat mempengaruhi pembentukan tempat pemukiman tertentu.<sup>38</sup>

Perluasan kota, masalah pemukiman, dan ledakan penduduk yang demikian tajam merupakan konsekuensi dari berkembangnya kota dari segi ekonomi. Dibangunnya pusat industri, dan pesatnya perdagangan adalah fenomena yang terlahir dari perkembangan kota itu sendiri. Oleh karena itu, pengamatan tentang ekonomi perkotaan yang merupakan perkembangan dari sektor ekonomi desa yang notabene hanya berkutat pada wilayah pertanian tanpa adanya perluasan sistem kearah yang lebih maju wajib diketahui guna menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat kota.<sup>39</sup> Ekonomi perkotaan sebagaimana dijelaskan oleh Sukanto Reksohadiprodjo dan A.R. Karseno adalah sebuah analisa ekonomi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kota

---

<sup>37</sup>Colin MacAndrews dan Rahardjo, *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia: Suatu Perbandingan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm., 4.

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm., 5.

<sup>39</sup> Ekonomi perkotaan pada awal terbentuknya kota merupakan perpanjangan dari berkembangnya sistem pertanian, maksudnya adalah ketika sebuah desa dengan pertaniannya memproduksi hasil-hasil pertanian tanpa adanya pengolahan lebih lanjut maka ekonomi perkotaan awal adalah kebalikannya. Ada produksi pertanian yang diolah dalam industri, ada sistem distribusi yang kemudian bergerak menjadi sistem perdagangan dan sebagainya, sampai sebuah kota berkembang menjadi kota besar yang mengorbankan tanah-tanah pertanian sebagai lahan bagi perluasan kota.

dalam perkembangannya. Persoalan-persoalan itu dapat dipecahkan secara rasional dengan menerapkan ilmu ekonomi.<sup>40</sup>

Pada zaman Belanda fungsi dan peranan kota diprioritaskan pada aspek untuk memperlancar pemerintahan dan mengumpulkan hasil perkebunan, oleh karena itu diketahui adanya kota-kota yang berkembang pesat seperti Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Sedangkan perencanaan pembangunan kota diarahkan untuk kesejahteraan Belanda, misalnya penetapan kawasan terbaik sebagai tempat tinggal atau kawasan perumahan Belanda, misalnya kota Malang, Bandung dan sebagainya.<sup>41</sup> Situasi yang berkembang dalam kehidupan kota kolonial adalah sebuah perpanjangan dari tahapan-tahapan yang telah ada dalam kota itu sebagai sebuah ciri khas kota kolonial. Ciri tersebut antara lain keberadaan jalan raya maka berdirilah kantor-kantor pemerintahan asing dan Benteng. Kemudian muncul pemukiman Eropa, klub-klub dan lapangan balapan kuda. Jalan kereta api dan jembatan penghubungnya banyak didirikan,<sup>42</sup> semua fasilitas tersebut bertitik tolak pada kepentingan kolonial.

## H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulisan tentang “Perkembangan Kota Malang 1914-1940: Suatu Tinjauan

---

<sup>40</sup> Sukanto Reksahadiprodjo dan A.R. Karseno, *Ekonomi Perkotaan* (Yogyakarta: BPFU-UGM, 1982), hlm., 1.

<sup>41</sup> Ilhami, *op. cit.* hlm., 13.

<sup>42</sup> Susan J. Lewandosuki, “Changing Form and Function in Ceremonial and The Colonial Port City in India: A Historical Analysis Of Madurai and Madras”, *Modern Asia Studies*, II, 2 (1977): 82-122.

Sosial-Ekonomi” merujuk pada sistematika permasalahan yang terbagi dalam lima bab.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat subbab-subbab seperti: Latar Belakang Permasalahan, Tujuan Penulisan, Ruang Lingkup Pembahasan, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika penulisan dimana kesemuanya itu termasuk dalam proposal penulisan.

Bab II Kota Malang Dalam Penguasaan Pemerintah Kolonial. Kondisi awal kota pedalaman dan riwayatnya sebagai pusat pemerintahan pada masa klasik. Penyebutan ‘Malang’ memang baru terdengar saat banyak orang belajar memahami riwayat kerajaan Singosari yang diyakini berada di sebelah Utara kota yang sekarang. Namun kondisi geografis yang mengelilinginyalah yang mempunyai kontribusi sangat besar dari sebutan Malang itu sendiri. Kota Malang tumbuh sebagai bayang-bayang kota Pasuruan, ketika perdagangan gula dan hasil-hasil bumi dari wilayah Timur Jawa ini mengalami jaman keemasan, Malang tampil sebagai terminal transit barang-barang tersebut. Dalam bab ini, kilasan tentang keadaan wilayah akan memudahkan pemahaman awal kita mengenai permasalahan pertama tentang julukan kota Malang sebagai kota pemukiman, ketika pesatnya pertumbuhan penduduk menjadi sebuah fenomena yang berdampak pada kebutuhan lahan. Heterogenitas penduduk, baik secara etnologi maupun status sosial menjadikan warna tersendiri terhadap kajian kependudukan.

Bab III Pemekaran kota Malang merupakan bentuk perubahan sarana kehidupan masyarakat di kota Malang. Perluasan-perluasan wilayah pemukiman, perangkat-perangkat kebutuhan dan peranan pemerintah menjadi ulasan bagi

kompleksitas pengkotaan. Penataan kota sehingga menyerupai sistem *grid* dengan jalur-jalur transportasi, memudahkan penduduk kota menjangkau tiap sudut kota. Malang tidak hanya merupakan dominasi masyarakat Eropa saja, peranan warga Timur asing lainnya terhadap perkembangan kota mulai dapat dilihat. Bukti dari keikutsertaan mereka bisa dinilai dari pengadaan sarana-sarana pendidikan, kesehatan dan berbagai sarana hidup dalam lingkungannya, nama-nama khas yang menunjukkan jati diri etnis tertera diatas papan-papan nama.

Bab IV, Sosial-Ekonomi Perkotaan. Sistem pemerintahan yang baik, penataan ruang kota yang sempurna, pengadaan sektor-sektor ekonomi bagi masyarakatnya juga berkembang sangat pesat. Pertumbuhan dunia industri di Malang sebagai wilayah yang mengolah hasil-hasil alam daerah sekitar mulai marak, oleh karena itu sektor pertanian masih menjadi salah satu penghasilan rakyat pada masa-masa awal mengkotanya wilayah ini. Industri perkeretaapian yang sudah sejak lama berada di kota Malang, industri rokok, industri tepung tapioka dan masih banyak lagi industri-industri kerakyatan. Pemerintah kota menggunakan lahan tersendiri bagi sentra industri tersebut untuk memudahkan penataan kota seperti yang diinginkan. Mobilitas masyarakat dibidang ekonomi tidak hanya dalam sektor industri, masih ada sektor perdagangan, dan tidak sedikit penduduk yang bergelut di lapangan kedinasan seperti badan-badan pemerintah. Perekrutan pegawai pada lembaga-lembaga pemerintah terbatas pada tingkat pendidikan tertentu. Masalah kesejahteraan memang masih diukur berdasarkan pendapatan, oleh karena itu pemerintah kota mengklasifikasikan masyarakatnya berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut. Pajak perorangan atas pendapatan sudah

mulai terdaftar. Pemerintah memberikan kesempatan bagi hidupnya organisasi-organisasi sosial di kota ini. Perkembangan kota terus berjalan seiring dengan gerak masyarakatnya baik melalui dunia pendidikan maupun kesehatan sebagai sarana penentu keberhasilan perkembangan kondisi sosialnya.

Bab V Kesimpulan dan Penutup, dalam bab ini akan diuraikan semua jawaban yang terdapat dalam permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I.

## **BAB II**

# **KOTA MALANG DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**